

**ANALISIS KEBIJAKAN
KERJASAMA UNIVERSITAS TERBUKA
DENGAN BKKBN**

Oleh
Dewi Mutiara
NIP. 131 572 745

Universitas Terbuka

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
2000**

Kata Pengantar

Makalah ini merupakan laporan hasil analisis kebijakan kerjasama Universitas Terbuka (UT) dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Program Studi D-3 Komunikasi Penyuluhan.

Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi program kerjasama tersebut dengan melihat kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi pada proses pelaksanaannya dan kemungkinan pengaruhnya terhadap hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya, penulis mencoba memberikan solusi untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan pola mencari alternatif solusi kebijakan generik dari David L. Weimer dan Aidan R. Winning.

Makalah ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para pengelola program D-3 Komunikasi Penyuluhan atau pihak lain yang akan menyelenggarakan program kerjasama yang serupa.

Penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan makalah ini. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pendahuluan	1
A. Analisis Permasalahan	2
I. Memahami Permasalahan.....	2
II. Tujuan dan Hambatan.....	9
III. Metoda untuk Mencari Alternatif Penyelesaian.....	12
B. Analisis Alternatif Penyelesaian	12
I. Kriteria Evaluasi.....	12
II. Alternatif-Alternatif Kebijakan.....	12
III. Evaluasi dan Rekomendasi.....	17
Daftar Pustaka	21
Lampiran-Lampiran	22

ANALISIS KEBIJAKAN KERJASAMA UNIVERSITAS TERBUKA DENGAN BKKBN

Pendahuluan

Pada tahun 1991, Universitas Terbuka (UT) mengadakan kerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyekolahkan para pegawai BKKBN, yaitu para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan para Pengawas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pada program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan di FISIP-UT, dalam bentuk bea siswa selama 4 tahun (Naskah Kerjasama UT No. 6746/PT45.5/T/1991 dan BKKBN No. 287/HK-104/H3/91 Tentang Pengembangan Tenaga Pegawai BKKBN).

Adapun dana yang dikeluarkan untuk program kerjasama ini diperoleh dari bantuan Bank Dunia. Jika yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktunya, maka untuk selanjutnya dia harus membayar sendiri uang kuliahnya sampai selesai.

Untuk tahap pertama, yaitu pada masa registrasi 92.2, BKKBN menyekolahkan sebanyak 1500 orang PKB dan PLKB dari 25.000 orang yang direncanakan (SK Kepala BKKBN No. 135/HK-010/H3/1992). Selanjutnya pada tahap kedua, yaitu masa registrasi 93.2, ditambah lagi 1500 orang. Sehingga keseluruhannya ada 3000 orang. Namun, hingga saat ini yang aktif keseluruhannya ada 2984 orang, terdiri dari angkatan pertama 1474 orang dan angkatan kedua 1510 orang (Lampiran 1).

Makalah ini mencoba untuk mengevaluasi kebijakan kerjasama UT dengan BKKBN tersebut di atas, dan pengaruhnya terhadap hasil belajar mahasiswa (dalam hal ini para PKB dan PLKB), serta memberikan rekomendasi alternatif-alternatif kebijakan kerjasama agar dapat digunakan sebagai masukan bagi pelaksanaan kebijakan tersebut dan kebijakan-kebijakan kerjasama yang akan datang.

Metodologi yang digunakan dalam makalah ini adalah metoda rasionalis, yang terdiri dari analisis permasalahan dan analisis alternatif penyelesaian. Analisis permasalahan terdiri dari memahami permasalahan yang dibagi atas deskripsi gejala dan pemodelan permasalahan, memilih dan menjelaskan tujuan dan hambatan, serta memilih metoda untuk mencari alternatif penyelesaian. Analisis alternatif penyelesaian terdiri dari memilih kriteria evaluasi, menjelaskan alternatif kebijakan, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (Partowidagdo, 2000).

A. Analisis Permasalahan

I. Memahami Permasalahan

a. Deskripsi Gejala

Program D-3 Komunikasi Penyuluhan merupakan program kerjasama antara UT dengan BKKBN yang mulai diselenggarakan pada masa registrasi 92.2 (tahun 1992 semester 2). Program ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman kepada para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Pengawas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Secara keseluruhan, mahasiswa Program D-3 Komunikasi Penyuluhan harus menyelesaikan 120 SKS yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu matakuliah teori sebanyak 90 SKS dan kelompok matakuliah praktek sebanyak 30 SKS. Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan sebanyak 120 SKS tersebut adalah selama 8 semester. Waktu yang cukup lama ini sengaja dibuat mengingat para PKB dan PLKB ini masih tetap harus bekerja di samping kuliah.

Jadi, sampai dengan tahun 2000 ini, mahasiswa D-3 Komunikasi Penyuluhan asal BKKBN rata-rata telah mengikuti kuliah 8 tahun untuk angkatan I dan 6 tahun untuk angkatan II. Lamanya waktu belajar mahasiswa ini sangat mengecewakan, baik bagi mahasiswa sendiri maupun bagi UT dan BKKBN sebagai pengelola.

Begitu juga dengan hasil-hasil ujian yang telah dicapai mahasiswa, umumnya tidak menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai rata-rata mahasiswa untuk setiap semester. Pada semester I misalnya; mahasiswa angkatan pertama yang mendapat nilai A hanya 0,26 %, nilai B sebanyak 1,06 %, nilai C sebanyak 38,6 %, nilai D sebanyak 53,72 %, dan nilai E 8,07 %. Hasil yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada semester-semester berikutnya (Lampiran 2). Begitu juga dengan jumlah lulusannya. Sampai bulan Juli 2000, baru 1477 orang mahasiswa yang telah lulus, atau kurang dari 50 % (lampiran 3).

Cukup banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kelulusan mahasiswa ini, antara lain; pembuatan ringkasan modul, pembuatan makalah untuk membantu nilai Ujian Akhir Semester (UAS), tutorial tertulis melalui surat kabar "Mitra Desa" dan sebagainya. Tetapi hasilnya tetap belum memuaskan.

Rendahnya nilai mahasiswa dan sedikitnya kelulusan mahasiswa ini, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain; kurangnya motivasi belajar mahasiswa, sulitnya bahan belajar (seperti; modul, soal) serta kurang baiknya pelayanan administratif dan akademik dari pengelola.

b. Pemodelan permasalahan

Pemodelan permasalahan terdiri dari analisis kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan pemerintah (government failure).

Kegagalan pasar

Kegagalan pasar yang berkaitan dengan kerjasama ini meliputi permasalahan-permasalahan eksternalitas, monopoli alamiah, asimetri informasi, preferensi, dan ketidakpastian.

1. Eksternalitas

Pengabaian permasalahan lingkungan (eksternalitas) baik dalam hal fisik maupun sosial telah mengakibatkan pembangunan di Indonesia mengalami krisis. Internalisasi dari eksternalitas dibutuhkan bila Indonesia menginginkan pembangunan manusia yang berkelanjutan di masa datang (Partowidagdo, 2000). Oleh sebab itu kebijakan BKKBN untuk menyekolahkan pegawainya itu sebaiknya jangan sampai berhenti untuk satu periode saja, namun terus dilanjutkan secara bertahap dan merata di seluruh Indonesia. Karena menurut para PKB dan PLKB peningkatan pendidikan ini sangat banyak pengaruhnya terhadap tugas mereka sehari-hari dan terhadap masyarakat yang merupakan binaannya.

2. Monopoli Alamiah

Sebagian besar PKB dan PLKB yang ditunjuk untuk mengikuti program D-3 Komunikasi Penyuluhan ini berasal dari kota-kota besar di Pulau Jawa, dan kota-kota besar di luar Jawa, seperti Medan dan Ujungpandang. Sehingga dirasakan kurang adil bagi daerah-daerah lain.

3. Asimetri Informasi (ketidaktepatan informasi)

Ketidaktepatan informasi (baik karena tidak tahu atau disengaja) dapat mengakibatkan keputusan yang keliru (Partowidagdo, 2000). Hal ini terjadi pada pelaksanaan kerjasama UT dan BKKBN.

Pada kasus kerjasama UT dan BKKBN di bidang pendidikan ini, informasi yang berhubungan dengan data pribadi mahasiswa seperti; nama, tempat tanggal lahir, dan agama, banyak yang salah. Sehingga menimbulkan masalah dan kekacauan pada saat yang bersangkutan menerima modul, mengikuti ujian dan menerima ijazah.

Contoh: Menurut data yang ada, si A beragama Kristen, oleh sebab itu pada saat pengiriman modul (dikirim sesuai dengan perjanjian kerjasama) si A akan dikirim modul Pendidikan Agama Kristen. Ternyata si A menolak karena ia beragama Islam,

dan ia menginginkan modul Pendidikan Agama Islam. Jika si A aktif berkomunikasi dengan pengelola di Pusat, maka kasus tersebut akan segera dapat diselesaikan dengan mengirim kembali modul yang suai kepada yang bersangkutan. Jika tidak, maka permasalahan lain akan timbul.

Permasalahan lain timbul, pada saat ujian si A akan diberi soal matakuliah pendidikan Agama Kristen. Tentu saja si A menolak. Hal ini tentu saja menimbulkan dua kali kekecewaan pada si A dan kerepotan bagi penanggung jawab ujian yang harus segera mencari soal baru bagi si A.

Selain itu, jika kemudian si A dapat ikut ujian, maka akan ada masalah lain, yaitu nilainya kemungkinan tidak diproses karena adanya perbedaan agama tersebut. Nilai yang bersangkutan baru akan keluar jika si A menyatakan bahwa dia beragama Islam secara tertulis.

Selanjutnya, ketidaktepatan dalam hal penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, akan mengakibatkan kesalahan dalam penulisan nama di ijazah. Padahal ijazah yang telah dibuat tidak mungkin diganti baru. Perbaikan nama dan tempat tanggal lahir hanya dapat dilakukan dengan cara membuat Surat Keterangan tentang adanya kekeliruan tersebut.

Ketidakadilan dan ketidaksampaian informasi juga terjadi pada program kerjasama ini, misalnya informasi tentang jadwal ujian, perubahan mata kuliah dan sebagainya. Biasanya jika terjadi perubahan pada jadwal ujian atau matakuliah, akan diinformasikan kepada mahasiswa melalui BKKBN Pusat, Kepala BKKBN Propinsi / Kabupaten, Kepala Balai Diklat, serta UPBJJ-UT di daerah. Namun, dalam kenyataannya, banyak mahasiswa yang terlambat mengetahui informasi tersebut atau bahkan tidak tahu sama sekali. Sehingga pada saat ujian, banyak mahasiswa yang mengeluh karena belum sempat belajar. Hal ini umumnya banyak terjadi di daerah-daerah di luar Jawa.

4. Preferensi

Budaya malas dan budaya mencari jalan pintas merupakan sumber kegagalan dan dapat menghambat keberhasilan dari pelaksanaan program. Selain itu, sikap malas dan selalu mencari jalan pintas ini akan memberi peluang tumbuhnya KKN.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa kebijakan BKKBN untuk menyekolahkan para PKB dan PLKB ini akan memberikan eksternalitas positif bagi masyarakat yang menjadi binaan dari para PKB dan PLKB tersebut. Dengan ditingkatkannya pendidikan mereka, akan membuat pengetahuan mereka lebih meringkat dan mereka akan bekerja lebih profesional dalam menghadapi masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ditekankan kepada mereka agar lebih serius untuk belajar, dan menghindari usaha-usaha untuk mencari jalan pintas dalam menyelesaikan pendidikannya.

Begitu juga dengan pihak pengelola, jangan sampai ada keinginan dari mereka untuk meluluskan mahasiswa dengan cara yang tidak benar, hanya demi prestasi dan agar dipercayai keberhasilannya oleh Bank Dunia sebagai pemberi dana.

5. Ketidakpastian

Pada pelaksanaan program D-3 Komunikasi Penyuluhan kerjasama UT dan BKKBN ini sering ada ketidakpastian, baik dalam hal jadwal ujian maupun dalam hal penerimaan modul dan nilai ujian. Hal ini akan mengganggu proses belajar mahasiswa. Meskipun untuk beberapa kasus, kondisi ini dapat dimaklumi, misalnya untuk modul, UT umumnya masih tergantung kepada para penulis dari universitas negeri lain, begitu juga pada saat pencetakannya dan pendistribusiannya, masih tergantung pada instansi-instansi lain seperti Kantor Pos dan sebagainya. Begitu juga dalam pengiriman nilai, banyak matakuliah yang misalnya nilai praktikumnya belum masuk (mahasiswa belum menyerahkan), sehingga nilainya belum keluar, dan akibatnya memperlambat proses penilaian dan pengiriman nilai kepada mahasiswa.

Kegagalan Pemerintah

1. Demokrasi

Demokrasi perlu dikembangkan dalam proses belajar mengajar. Mahasiswa harus didorong agar aktif bertanya kepada dosen maupun pengelola, baik secara langsung tatap muka, maupun melalui surat, telepon, e-mail, internet, atau memanfaatkan waktu diskusi-diskusi pada saat tutorial

2. Birokrasi

Permasalahan birokrasi juga terjadi di beberapa daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerjasama ini.

Misalnya; untuk daerah tertentu banyak mahasiswa BKKBN yang mengeluh, karena tidak diperbolehkan untuk berkonsultasi langsung dengan para pengelola di UT dan BKKBN Pusat. Mereka harus melapor dulu pada Kepala Kantornya atau pengelola di daerah (secara berjenjang), kemudian mereka yang akan menyampaikannya ke Pusat. Hal ini tentu saja sangat menghambat mahasiswa, karena, untuk penyelesaiannya akan membutuhkan waktu yang lama, padahal permasalahannya biasanya sangat mendesak dan perlu pemecahan segera.

Kekakuan peraturan di atas akan menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program.

3. Birokrat

Kegagalan birokrat disini antara lain, kurang bertanggung jawabnya para pengelola atau penanggung jawab program di beberapa daerah terhadap proses belajar mahasiswa. Banyak pengelola yang tidak sungguh-sungguh atau tidak serius dalam melaksanakan tugasnya. Padahal mereka telah diangkat dan ditetapkan melalui SK Kepala BKKBN. Hal ini diketahui dari kurangnya informasi yang mereka miliki atau bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang kondisi mahasiswanya. Dari hasil

wawancara mendalam dengan beberapa mahasiswa, banyak yang mengatakan bahwa para pengelola banyak yang tidak mau tahu dan malas melakukan tugasnya. Mahasiswa merasa tidak diperhatikan oleh mereka dan dibiarkan sendiri dengan berbagai macam masalahnya.

Kurangnya pengawasan terhadap para pengelola ini ikut mendukung terjadinya kondisi di atas.

4. Desentralisasi

Agar daerah lebih fleksibel, efektif, motivatif dan partisipatif, perlu ada pemberian desentralisasi tugas dan dana yang lebih besar ke daerah atau kepada tingkat yang lebih rendah (Partowidagdo, 2000). Dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan ini, para pengelola di daerah sering mengeluh mengenai kurangnya dana untuk mengelola program. Sehingga banyak kegiatan yang belum dilaksanakan, misalnya pelaksanaan tutorial menjadi tersendat-sendat.

Permasalahan lain adalah banyak kebijakan dapat diimplementasikan lain atau berbeda dari yang dimaksud, ini terjadi karena ada perbedaan kepentingan dan persepsi antara pusat dan daerah. Oleh karena itu perlu ada kesamaan persepsi dulu antara pusat dan daerah.

Permasalahan Distribusi

Dalam pelaksanaan program D-3 Komunikasi Penyuluhan kerjasama UT dan BKKBN ini, di samping ada kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah, terdapat juga permasalahan dalam distribusi.

Permasalahan distribusi terdiri dari keadilan dalam memperoleh kesempatan dan keadilan dalam mendapatkan penghasilan.

1. Keadilan dalam memperoleh kesempatan

Kebijakan BKKBN untuk “menyekolahkan” para pegawainya (PKB dan PLKB) dengan memberikan bea siswa, untuk sementara ini hanya diperuntukkan bagi para PKB dan PLKB yang daerahnya dianggap berprestasi atau berhasil dalam meningkatkan dan menyukseskan program KB. Hal ini dirasakan tidak adil bagi daerah-daerah lain. Karena hal ini justru akan memperlebar kesenjangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Untuk daerah yang telah berhasil dengan program KBnya akan semakin menonjol dengan diberikannya kesempatan bagi para PKB dan PLKB di daerah tersebut untuk meningkatkan pendidikannya melalui program D-3 Komunikasi Penyuluhan. Sebaliknya, untuk daerah-daerah tertentu yang program KBnya kurang berhasil akan semakin ketinggalan dari daerah lain, karena para pegawainya hanya lulusan SLTA. Sehingga kurang mendukung dalam peningkatan dan pengembangan program KB.

2. Keadilan dalam mendapatkan penghasilan

Keadilan dalam memperoleh kesempatan akan membantu keadilan dalam mendapatkan penghasilan (Partowidagdo, 2000).

Pada program kerjasama UT dan BKKBN ini, mahasiswa yang mendapat kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya pada program D-3 Komunikasi Penyuluhan akan memperoleh jenjang karier yang lebih tinggi dan kemungkinan akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik karena tingkat pendidikannya lebih tinggi. Sedangkan untuk mereka yang tidak diikutsertakan dalam program ini, sulit untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, karena terbatasnya pengesahan mereka.

II. Tujuan dan Hambatan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan kerjasama UT dan BKKBN serta pengaruhnya terhadap kelulusan mahasiswa. Hambatan-hambatan bagi kelulusan mahasiswa terdiri dari hambatan dari dalam diri mahasiswa sendiri,

hambatan geografis, hambatan budaya, hambatan pekerjaan, dan hambatan bahan belajar.

Hambatan dari diri pribadi mahasiswa, misalnya, kurangnya minat atau motivasi dalam diri mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Hal ini sangat menghambat proses belajar mereka, karena minat dan motivasi ini merupakan modal dasar bagi mereka untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Kurangnya motivasi dari mereka ini diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa di daerah Medan, Jawa Barat, dan Banjarmasin, dimana mereka mengatakan bahwa mereka kuliah hanya karena ditugaskan oleh atasannya saja (tugas belajar). Akibatnya, dalam belajar mereka menjadi pasif, hanya menunggu informasi dari para pengelola program. Jika nilai atau modul belum diterima mereka hanya diam dan menunggu saja, kurang ada usaha untuk mencari informasi

Kurangnya minat dan motivasi mahasiswa ini terjadi karena kebijakan menyekolahkan para PKB dan PLKB bukan atas dasar keinginan mereka sendiri, melainkan ditunjuk karena daerahnya dianggap berhasil dalam menyukseskan program KB.

Hambatan geografis, terjadi karena jauhnya tempat tinggal mereka dengan tempat-tempat ujian, tutorial dan Kantor BKKBN Propinsi dan Kabupaten serta UPBJJ-UT. Mahasiswa umumnya tinggal di kecamatan-kecamatan di daerah-daerah terpencil. Untuk sampai ke tempat ujian saja ada yang sampai membutuhkan waktu selama dua hari dengan naik perahu (misalnya di kepulauan Riau). Untuk diketahui, mahasiswa D-3 Komunikasi Penyuluhan asal BKKBN ini tersebar di 265 Kabupaten di seluruh Indonesia. Jauhnya tempat tinggal mereka ini, membuat mereka jarang berkomunikasi baik dengan teman kuliah maupun dengan para pengelola program.

Hambatan budaya, berupa belum membudayanya mahasiswa dengan dengan sistem belajar jarak jauh. Mereka belum terbiasa dengan cara belajar mandiri. Jika ada tutorial yang seharusnya merupakan tempat mereka bertanya atau tempat berdiskusi dengan Tutor mengenai materi-materi yang dianggap sulit oleh mahasiswa, namun

dalam pelaksanaannya tutorial tersebut dilakukan seperti dalam kuliah tatap muka. Dimana Tutor diminta untuk menerangkan seluruh materi yang ada di modul. Padahal tutorial tidak sama dengan proses belajar yang biasa dilaksanakan di sekolah atau universitas konvensional. Dalam tutorial bukanlah Tutor yang harus aktif. Tutor tidak menerangkan secara terus menerus dan kemudian mahasiswa mencatatnya, tetapi mahasiswa yang harus aktif. Dalam tutorial lebih dititikberatkan kepada pemecahan masalah secara bersama-sama dengan bimbingan Tutor. Ini yang belum membudaya pada mahasiswa.

Hambatan pekerjaan, terjadi karena, meskipun mereka kuliah, namun mereka tidak dibebaskan dari pekerjaannya. Mereka harus tetap bekerja seperti biasa dengan beban kerja yang sama dengan mereka yang tidak kuliah. Dispensasi yang diberikan pada mereka hanyalah pada saat mereka ujian. Kondisi ini menjadi keluhan banyak mahasiswa. Menurut mereka, jadwal ujian selalu bersamaan dengan tugas untuk membuat laporan pekerjaan kantor. Selain itu banyak pekerjaan kantor yang menggunakan sistem target, sehingga mau tidak mereka harus memprioritaskan pekerjaan kantor mereka.

Hambatan bahan belajar, terjadi khususnya untuk semester-semester awal, dimana Bahan belajar (modul) umumnya baru diterima dua atau tiga bulan sebelum ujian atau bahkan ada yang sampai satu bulan atau belum menerima modul sama sekali sampai saatnya ujian. Hal ini terjadi karena pada saat program D-3 Komunikasi ini dibuka ada beberapa modul yang belum selesai, sehingga berakibat pada keterlambatan dalam pencetakan dan pendistribusiannya. Di samping itu, kebijakan dalam pengiriman modul kepada mahasiswa dikirim melalui Kantor BKKBN Kabupaten, akibatnya bagi para pengelola yang pasif, maka pemberian modul itu akan menunggu mahasiswa datang ke Kabupaten, misalnya pada saat rapat mingguan/bulanan, atau pada saat mereka ambil gaji. Sehingga menambah waktu terbuang, karena modul didiamkan begitu saja. Keterlambatan dalam penerimaan modul ini akan berdampak tidak baik bagi mahasiswa, seperti menurunnya semangat belajar karena modul yang tak kunjung datang, atau sempitnya waktu yang tersedia untuk mempelajari modul.

III. Metoda Untuk Mencari Alternatif Penyelesaian

Metode untuk mencari alternatif penyelesaian pada makalah ini sebagian besar mengikuti petunjuk mencari solusi kebijakan generik dari David L. Weimer dan Aidan R. Vining sebagaimana yang tertera dalam lampiran 4.

B. Analisis Alternatif Penyelesaian

I. Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi yang dipilih adalah dampak positif (manfaat) dan dampak negatif (biaya) dari alternatif-alternatif kebijakan yang ada.

Alternatif-alternatif kebijakan dalam makalah ini juga sebagian besar mengikuti pola mencari alternatif solusi kebijakan generik dari David L. Weimer dan Aidan R. Winning sebagaimana yang tertera pada Lampiran 4.

II. Alternatif-Alternatif Kebijakan

Kegagalan Pasar

1. Eksternalitas

Kebijakan BKKBN untuk menyekolahkan para pegawainya pada program D-3 Komunikasi Penyuluhan UT ini sebaiknya berkelanjutan, karena banyak dampak positifnya baik bagi para PKB dan PLKB itu sendiri maupun terhadap masyarakat dan daerah yang menjadi binaannya.

2. Monopoli Alamiah

Seyogyanya para PKB dan PLKB yang ditunjuk untuk mengikuti program ini, jangan dimonopoli oleh para PKB dan PLKB dari daerah-daerah atau kota-kota di Jawa dan kota-kota besar lainnya. Seharusnya, justru para PKB dan PLKB dari daerah-daerah

yang jauh dari Jawa dan terpencil yang harus lebih diperhatikan, dan ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Dan, dengan diberlakukannya otonomi daerah, merupakan kesempatan yang paling tepat saat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para PKB dan PLKB putra-putra daerah, sehingga pada saatnya nanti mereka dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat bersaing atau tidak ketinggalan dari para PKB dan PLKB dari kota-kota besar.

3. Asimetri Informasi

Ketidakadilan informasi harus dihilangkan dengan cara meningkatkan network antar stake holders (UT Pusat, BKKBN Pusat, Kantor BKKBN Propinsi/Kabupaten, Kepala Balai Diklat, UPBJJ-UT dan mahasiswa) Mahasiswa di seluruh pelosok Indonesia harus mendapatkan informasi yang sama dan jelas dalam proses belajarnya. Selain itu, pemanfaatan dari media-media komunikasi yang ada seperti telepon, internet, radio, TV dan sebagainya, perlu dilakukan semaksimal mungkin. Adanya warnet-warnet di seluruh Indonesia akan sangat mendukung program ini. Dan, pemanfaatan dari media ini seharusnya merupakan persyaratan utama bagi UT sebagai universitas yang menerapkan sistem belajar jarak jauh.

Kebenaran data pribadi mahasiswa merupakan sesuatu yang harus diprioritaskan dan jangan dianggap enteng, untuk menghindari masalah-masalah yang timbul di kemudian hari. Dalam kerjasama UT dan BKKBN, pada awalnya, untuk pengisian data pribadi mahasiswa tidak dilakukan oleh mahasiswa sendiri, melainkan oleh petugas yang ditunjuk oleh para pengelola berdasarkan SK Kerjasama dan SK Tugas Belajar dari BKKBN. Kebijakan ini ternyata menimbulkan banyak masalah, karena banyak data mahasiswa yang salah. Untuk itu, mahasiswa perlu mengisi ulang data pribadinya agar lebih akurat.

Kebijakan untuk mengisi kembali data pribadi mahasiswa ini memang membutuhkan waktu yang relatif lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar (untuk pembelian formulir registrasi dan biaya perangko), namun ini hanya sekali dan manfaatnya sangat banyak. Mahasiswa tidak perlu lagi direpotkan dengan adanya kesalahan nama,

agama, tempat dan tanggal lahir, dan sebagainya. Sebaliknya, UT pun tidak perlu repot-repot menghubungi kantor BKKBN atau mahasiswa setiap ada kesalahan atau menunggu komplain dari mahasiswa

Kebijakan untuk memberikan pengumuman atau informasi kepada mahasiswa melalui Kepala Kantor BKKBN Propinsi/Kabupaten dan Kepala UPBJJ-UT juga sebaiknya diubah. Surat menyurat tentang pengumuman dan informasi yang berkaitan dengan mahasiswa sebaiknya dikirim langsung kepada mahasiswa. Kantor BKKBN Propinsi/Kabupaten dan UPBJJ-UT sebaiknya hanya menerima tembusannya saja (tidak ada kewajiban untuk menyampaikan lagi kepada mahasiswa). Untuk itu perlu alamat yang jelas dan paling mudah untuk menghubungi mahasiswa.

4. Preferensi

Agar program kerjasama UT dan BKKBN ini dapat berhasil dengan baik, maka budaya malas dan ingin mencari jalan pintas dalam proses belajarnya perlu dihindarkan. Perlu ada regulasi untuk mencegah terjadinya KKN antara pengelola dan mahasiswa.

5. Ketidakpastian

Mengingat mahasiswa D-3 Komunikasi Penyuluhan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, maka, perlu ada aturan yang pasti, jelas dan tidak berubah-ubah tentang jadwal ujian, pengiriman modul, dan nilai. Karena, suatu perubahan bisa-bisa informasinya baru akan sampai kepada mahasiswa satu bulan kemudian (khususnya untuk daerah-daerah terpencil

Kegagalan Pemerintah

1. Demokrasi

Demokrasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kreativitas. Dosen dan Tutor harus dapat mendorong mahasiswanya untuk bertanya, baik secara langsung melalui Tutor maupun tidak langsung (melalui surat, telepon, e-mail, internet). Kelompok-kelompok diskusi perlu diaktifkan, dikembangkan dan dilakukan secara kontinue. Perlu ada penghargaan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, baik dari UT sebagai pengelola perkuliahan maupun dari BKKBN sebagai instansi langsung tempat mahasiswa bekerja.

2. Birokrasi

Untuk menghindari ketidakefisienan, maka aturan-aturan yang tidak perlu dan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini harus dihilangkan atau diganti. Misalnya keinginan mahasiswa untuk menghubungi langsung UT dan BKKBN Pusat sebaiknya jangan dilarang, karena justru akan lebih mempercepat proses penyelesaian belajar mereka.

Pendistribusian modul dan nilai, tidak perlu lagi melalui Kantor BKKBN Propinsi atau Kabupaten, sebaiknya langsung saja dikirim kepada mahasiswa. Meskipun hal ini membutuhkan waktu dan biaya lagi untuk meminta alamat mereka secara lengkap. Namun hasilnya, diharapkan akan lebih baik daripada dikirim melalui alamat kantor BKKBN.

3. Birokrat

Perlu ada pengawasan (kontrol) terhadap para pengelola program D-3 Komunikasi Penyuluhan di daerah. Jika perlu ada tindakan administratif terhadap mereka-mereka yang tidak bekerja secara profesional. Sebaliknya, terhadap mereka yang bekerja dengan baik dan profesional perlu diberikan rangsangan (insentif) yang memadai, sehingga mereka akan bekerja lebih baik lagi.

Para pengelola program perlu diberi pengertian bagaimana pentingnya hasil dari kerjasama ini, karena biayanya merupakan bantuan dari Bank Dunia, maka hasil yang baik dan memuaskan sangat dibutuhkan disini, agar Bank Dunia tidak merasa sia-sia

memberikan bantuan dana kesini, sehingga akan meningkatkan kepercayaan mereka dan menambah citra baik bagi Indonesia

4. Desentralisasi

Pendelegasian tugas dan dana kepada daerah perlu dilakukan setransparan dan seadil mungkin. Jangan sampai ada anggapan bahwa duitnya untuk orang pusat, pekerjaannya untuk daerah. Keluhan daerah perlu didengarkan dan diperhatikan. Pemberian dana sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Perlu ada kesamaan persepsi antara pusat dan daerah mengenai kebijakan kerjasama ini, sehingga implementasinya dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Permasalahan Distribusi

1. Keadilan dalam memperoleh kesempatan

Keadilan dalam memperoleh kesempatan khususnya dalam bidang pendidikan ini sangat penting dan asasi sekali bagi manusia. Oleh karena itu sebaiknya dalam memilih peserta jangan didasarkan pada daerah-daerah yang dianggap berhasil saja, tetapi diberikan kesempatan kepada semua pegawai BKKBN yang memenuhi syarat. Jika dana hanya tersedia untuk 3000 orang dulu, maka semua peminat dari seluruh Indonesia disaring atau di tes lebih dulu. Sehingga, nantinya peserta yang diterima adalah peserta yang memang benar-benar berminat dan mempunyai motivasi untuk meningkatkan pendidikannya. Jadi, tidak karena tugas semata-mata. Mahasiswa yang mempunyai minat dan motivasi untuk sekolah dijamin akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan mahasiswa yang sekolah karena terpaksa.

2. Keadilan untuk memperoleh pendapatan

Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, latihan (training), network dan sistem informasi untuk mahasiswa yang membutuhkan diperlukan untuk mencapai keadilan untuk memperoleh pendapatan.

III. Evaluasi dan Rekomendasi

Instrumen kebijakan yang digunakan pada evaluasi kebijakan kerjasama UT dan BKKBN ini antara lain meliputi instrumen hukum dan regulasi, politik, komersial, pendidikan, informasi, finansial, pengadaan dan jasa publik.

Sehubungan dengan itu, ada beberapa usulan yang dapat disampaikan disini yaitu:

1. Network antar stake holders (UT Pusat, BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi/Kabupaten, UPBJJ-UT di daerah, dan mahasiswa) agar lebih lebih difungsikan, ditingkatkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, agar program kerjasama ini dapat berhasil dengan baik.

Adanya network antar stake holders ini akan menghindari ketidakefisienan, dan membuat pelaksanaan program dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, akan mengurangi kesalahfahaman yang mungkin terjadi antar stake holder.

2. Pemanfaatan media komunikasi perlu dilakukan semaksimal mungkin baik dalam hal pengelolaan kerjasama maupun dalam proses belajar mengajar.

Di samping itu kerjasama dengan Kantor Pos atau Warnet-warnet agar lebih ditingkatkan untuk lebih mendukung proses belajar mahasiswa.

3. Jika program kerjasama ini berhasil dengan baik, maka akan memberikan kepercayaan dari si pemberi dana (Bank Dunia), oleh sebab itu, para pengelola agar betul-betul serius menangani program ini dan perlu menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada KKN.

4. Pengawasan terhadap para penanggung jawab dan pengelola program agar lebih ditingkatkan. Pengelola yang bertanggung jawab dan aktif serta bersungguh-sungguh dalam melakukan kewajibannya, akan berhasil mendorong mahasiswa untuk selesai dalam waktu yang relatif cepat. Misalnya, untuk daerah Yogyakarta dan Probolinggo yang pengelolanya dikenal aktif dan serius menangani permasalahan mahasiswa, ternyata hasilnya baik, karena sebagian besar mahasiswanya dapat lulus dalam waktu yang tidak terlalu lama.
5. Untuk meningkatkan kelulusan mahasiswa, sebaiknya ada dorongan motivasi kepada mereka untuk belajar dengan sungguh-sungguh. BKKBN sebagai instansi tempat mereka bekerja dapat membuat peraturan yang sifatnya mendorong mereka untuk selesai dengan segera. Penghargaan dapat diberikan kepada mereka yang telah lulus, sehingga merangsang yang lain untuk mempercepat penyelesaian kuliahnya. Di samping itu jika memungkinkan, beban kerja mereka yang kuliah ini sebaiknya dikurangi khususnya pada saat mereka akan menghadapi ujian.
6. Perlu ada peningkatan tanggung jawab dan perhatian dari para pengelola kerjasama UT dan BKKBN terhadap keberhasilan program pendidikan ini (sebagai tanggung jawab moral). Karena penilaian Bank Dunia terhadap keberhasilan program ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan datang.
7. Peraturan-peraturan yang sifatnya menghambat dan merugikan mahasiswa agar dihilangkan. Jika perlu, dibuat aturan-aturan baru yang mendukung keberhasilan dari program kerjasama ini. Birokrasi yang menghambat dan mengurangi efisiensi agar dipangkas.
8. Kerjasama UT dan BKKBN ini sebaiknya tetap dilanjutkan, karena terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa maupun pengelola, ternyata hasilnya cukup memuaskan, karena menurut mahasiswa, pengetahuan yang

diperoleh dan dipelajari mereka sangat membantu dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari (Wawan, dkk 1994/1995) Secara umum, mereka mengatakan bahwa; setelah menjadi mahasiswa, mereka merasa lebih diperhatikan apabila mereka berbicara di depan publik dan dalam pergaulan antar instansi.

Hal lain yang dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa antara lain, pemberian matakuliah Sosiologi dan Psikologi Sosial telah membuat mereka lebih memahami kejadian-kejadian dalam masyarakat. Begitu pula dengan matakuliah Statistik dan Demografi, telah membantu mereka dalam menganalisis data-data kependudukan.

9. Jika program kerjasama ini akan dilanjutkan untuk tahap berikutnya, maka pengisian data pribadi harus dilakukan oleh mahasiswa sendiri, agar lebih akurat dan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu.

Selain itu, penentuan peserta jangan ditunjuk oleh atasan, tetapi harus atas dasar kemauan sendiri (benar-benar berminat). Dan, jika peminatnya melebihi kapasitas yang disediakan (misalnya dari segi dana), sebaiknya diadakan tes yang dilakukan secara transparan dan jauh dari KKN.

Untuk menghindari ketidakadilan dalam kesempatan memperoleh pendidikan, maka penyebaran peserta untuk setiap daerah agar lebih diperhatikan dan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah masing-masing.

10. Network antar stake holder di Pusat (UT, BKKBN Pusat, mahasiswa) maupun di Daerah (UPBJJ-UT, BKKBN Propinsi/Kabupaten, mahasiswa) agar lebih ditingkatkan. Perlu diadakan pertemuan dan komunikasi sesering mungkin antar stake holder untuk saling mengenal serta saling memahami budaya dan permasalahan yang terjadi di tempat masing-masing.

11. Untuk efisiensi, pendistribusian bahan belajar, nilai, dan surat untuk mahasiswa, sebaiknya langsung dikirim ke alamat mereka. BKKBN Pusat/Propinsi/Kabupaten, dan UPBJJ-UT di daerah cukup diberi tembusan saja.
12. Perlu ada pendelegasian tugas dan dana kepada daerah yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, dalam pendanaan agar dilakukan dengan transparan dan menghindari KKN.
13. Untuk meningkatkan partisipasi dari para pengelola di daerah, perlu ada insentif untuk merangsang mereka agar bekerja lebih baik. Karena, untuk jaman sekarang rasanya sulit untuk melakukan kegiatan yang sifatnya cuma-cuma. Apalagi kalau seandainya daerah tahu bahwa program ini ada dananya. Dan, ini juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pendapatan secara adil.
14. Perlu dikembangkan suasana demokrasi, dimana semua pihak termasuk mahasiswa dapat mengemukakan pendapat dan pandangannya dalam memperbaiki keadaan yang berkaitan dengan kerjasama ini.

Daftar Pustaka

1. Dunn, W.N. 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi kedua, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
2. Osborne, D. Gaebler T, 1992, *Reinventing Government*, Addison Wesley, New York.
3. Partowidagdo, W. 1999, *Memahami Analisis Kebijakan, Kasus Reformasi Indonesia*, ITB, Bandung.
4. Wawan R, dkk, 1994/1995, *Evaluasi Program Studi D-3 Komunikasi Penyuluhan Selama Enam Semester*, FISIP-UT, Jakarta.

---- Naskah Kerjasama UT No. 6746/PT45.5/T/1991 dan BKKBN No. 267/HK-104/H3/91 Tentang Pengembangan Tenaga Pegawai BKKBN

Lampiran-lampiran:

Lampiran 1: *Rekapitulasi Peserta D-3 Komunikasi Penyuluhan Universitas Terbuka*

Lampiran 2: *Hasil Ujian Semester 1 dan 2 Mahasiswa D-3 Komunikasi Penyuluhan Angkatan Pertama.*

Lampiran 3: *Rekapitulasi Data Kelulusan Peserta Program D-3 Komunikasi Penyuluhan UT Angkatan I dan II.*

Lampiran 4: Tabel 1: *Searching For Generic Policy Solutions.*

Universitas Terbuka

REKAPITULASI PESERTA D-III
KOMUNIKASI PENYULUHAN UNIVERSITAS TERBUKA

NO.	PROVINSI	ANG. I	ANG. II	KETERANGAN
1.	D. K. I. JAKARTA	42	45	
2.	JAWA BARAT	141	140	
3.	JAWA TENGAH	216	198	
4.	JAWA TIMUR	239	200	
5.	D. I. YOGYAKARTA	10	15	
6.	B. A. L. I.	18	20	
7.	D. I. ACEH	35	40	
8.	SUMATERA UTARA	119	121	
9.	SUMATERA BARAT	50	50	
10.	SUMATERA SELATAN	55	56	
11.	LAMPUNG	70	80	
12.	KALIMANTAN BARAT	47	53	
13.	KALIMANTAN SELATAN	53	35	
14.	SULAWESI UTARA	25	27	
15.	SULAWESI SELATAN	58	58	
16.	S. T. B.	35	60	
17.	R. I. A. U.	54	35	
18.	T. A. N. B. I.	24	25	
19.	BENGKULU	22	25	
20.	KALIMANTAN TENGAH	27	30	
21.	KALIMANTAN TIMUR	25	25	
22.	SULAWESI TENGGARA	20	20	
23.	SULAWESI TENGAH	21	25	
24.	HALUKU	18	27	
25.	R. I. I.	48	55	
26.	IRIAN JAYA	20	20	
27.	TIMOR TIMUR	12	25	
		1474	1510	

PUSAT PENDIDIKAN LATIHAN PEGAWAI DAN
TENAGA PROGRAM.

rekapd3/hl.

Hasil Ujian Semester I
Mahasiswa D-3 Komunikasi Penyuluhan
Angkatan Pertama

No	Mata Kuliah	Nilai					Jumlah Mahasiswa
		A	B	C	D	E	
1	Pendidikan Pancasila	3 (0,2%)	44 (3,04%)	526 (35,94%)	735 (52,30%)	122 (8,43%)	1447 (100%)
2	Psikologi Sosial	0 (0,0%)	16 (1,10%)	379 (26,17%)	912 (62,00%)	41 (2,74%)	1448 (100%)
3	Administrasi Manajemen	0 (0,0%)	14 (0,90%)	466 (32,10%)	810 (56,01%)	129 (8,91%)	1449 (100%)
4	Ilmu Alamiah Dasar	0 (0,0%)	18 (1,21%)	550 (37,90%)	726 (50,83%)	114 (7,87%)	1448 (100%)
5	Pengantar Sosiologi	0 (0,0%)	15 (1,04%)	546 (37,71%)	772 (53,31%)	115 (7,94%)	1448 (100%)
6	Bahasa Indonesia	13 (0,90%)	63 (4,30%)	604 (42,12%)	639 (44,56%)	115 (8,02%)	1434 (100%)
	Secara keseluruhan untuk seluruh mata kuliah semester I	0,26%	1,06%	38,6%	53,72%	8,07%	100%

Sumber: Puskom UT, yang diolah kembali oleh BKKEU Pusat Tahun 1993

Hasil Ujian Semester II
 Mahasiswa D-3 Komunikasi Penyuluhan
 Angkatan Pertama

No	Mata Kuliah	Nilai					Jumlah Mahasiswa
		A	B	C	D	E	
1	Pengantar Ilmu Komunikasi	50	91	179	650	117	1395
		(3,95%)	(6,52%)	(12,71%)	(47,12%)	(8,39%)	(100%)
2	Pendidikan Kewiraan	12	157	276	316	21	1397
		(1,22%)	(11,95%)	(52,71%)	(22,62%)	(1,50%)	(100%)
3	Statistika I	10	90	520	570	198	1396
		(0,72%)	(7,03%)	(37,25%)	(40,93%)	(14,19%)	(100%)
4	Ilmu Budaya Dasar	130	356	729	152	6	1392
		(9,40%)	(26,46%)	(52,71%)	(10,99%)	(0,43%)	(100%)
5	Demografi	162	330	719	182	10	1407
		(11,55%)	(23,52%)	(51,25%)	(12,97%)	(0,71%)	(100%)
6	Agama Islam	72	290	691	164	9	1376
		(5,23%)	(21,30%)	(50,36%)	(11,99%)	(0,07%)	(100%)
	Agama Hindu	0	0	12	7	0	19
		(0,00%)	(0,00%)	(63,16%)	(36,84%)	(0,00%)	(100%)
	Agama Buddha	0	0	0	1	2	3
		(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(33,33%)	(66,67%)	(100%)
	Agama Kristen	2	18	43	15	1	79
		(2,53%)	(22,78%)	(54,43%)	(18,99%)	(1,27%)	(100%)
	Agama Katolik	0	0	16	43	4	63
		(0,00%)	(0,00%)	(25,40%)	(68,25%)	(6,35%)	(100%)
		441	1363	4085	2108	350	8364
		(5,30%)	(16,30%)	(48,85%)	(25,19%)	(4,36%)	(100%)

REKAPITULASI DATA KELULUSAN PESERTA
PROGRAM D-3 KOMUNIKASI PENYULUHAN UT
ANGKATAN - I & II

No.	Propinsi	Jumlah Peserta		Jumlah Peserta yang Lulus berdasarkan SK					Jumlah Peserta		Jumlah Peserta yang Lulus berdasarkan SK					Jumlah Seluruh YG Lulus		Jumlah Peserta Belum Lulus				
		Angk-I	Angk-II	I	II	III	IV	V	Angk-I	Angk-II	I	II	III	IV	V	Jml	%	Jml	%			
1	DKI Jakarta	42	45	13	4	4	2	3	25	59,52	17	40,48	45	13	4	3	4	4	28	62,22	17	37,78
2	Jawa Barat	141	140	32	19	11	10	8	80	56,74	61	43,26	140	32	31	10	8	9	90	64,22	50	35,71
3	Jawa Tengah	216	197	115	23	16	6	13	173	80,55	43	19,91	197	67	49	27	18	10	171	86,53	26	13,20
4	Jawa Timur	239	197	68	51	19	7	12	157	65,69	82	34,31	197	48	18	40	16	16	138	70,33	59	29,95
5	D.I. Yogyakarta	10	15	10	-	-	-	-	10	100,00	0	0,00	15	5	2	1	3	-	11	73,33	4	26,67
6	Bali	18	20	10	5	1	1	1	18	100,00	0	0,00	20	-	11	-	1	5	17	85,00	3	15,00
7	D.I. Aceh	35	36	0	-	-	-	-	0	0,00	35	100,00	36	-	-	-	-	-	0	0,00	35	100,00
8	Sumatera Utara	118	121	10	5	5	10	8	33	32,20	80	67,80	121	2	2	2	4	3	17	14,03	109	89,26
9	Sumatera Barat	53	50	25	6	5	3	4	44	83,02	6	12,00	50	1	11	5	-	4	21	42,00	29	58,00
10	Sumatera Selatan	55	56	16	4	10	3	2	35	63,64	20	36,36	56	17	4	3	4	1	29	51,79	27	48,21
11	Lampung	78	79	50	6	3	4	4	67	85,90	11	14,10	79	12	27	13	4	4	60	75,95	19	24,05
12	Kalimantan Barat	46	52	2	4	2	-	-	8	17,39	25	82,61	52	1	2	2	-	1	6	11,54	46	88,46
13	Kalimantan Selatan	33	35	11	9	-	1	2	23	69,70	10	30,30	35	7	8	2	1	4	22	62,86	13	37,14
14	Sulawesi Utara	25	27	0	1	-	1	-	2	8,00	23	92,00	27	-	-	-	-	-	0	0,00	27	100,00
15	Sulawesi Selatan	56	60	5	3	-	2	1	10	17,86	48	85,71	60	-	1	1	-	-	2	3,57	55	96,43
16	N.T.B.	35	35	1	-	2	1	1	5	14,29	30	85,71	35	4	1	7	1	-	13	37,14	22	62,86
17	Riau	34	35	0	1	-	-	1	2	5,88	32	94,12	35	-	1	-	-	1	2	5,71	33	94,29
18	Jambi	24	25	2	2	2	-	5	11	45,83	13	54,17	25	-	4	-	1	5	20,00	20	80,00	
19	Bengkulu	22	25	13	2	2	2	1	20	90,91	2	9,09	25	14	4	2	-	1	21	84,09	4	16,00
20	Kalimantan Tengah	27	30	1	2	-	1	3	7	25,93	20	74,07	30	6	2	5	-	-	13	43,33	17	56,67
21	Kalimantan Timur	25	25	5	8	-	-	-	13	52,00	12	48,00	25	-	4	4	-	1	9	36,00	16	64,00
22	Sulawesi Tenggara	20	20	2	-	-	-	1	3	15,00	17	85,00	20	-	-	-	-	-	0	0,00	20	100,00
23	Sulawesi Tengah	21	23	1	1	1	1	1	4	19,05	17	80,95	23	1	-	-	-	1	5	21,74	20	87,26
24	Maluku	18	18	3	2	2	-	-	7	38,89	11	61,11	18	-	3	1	1	-	0	0,00	18	100,00
25	N.T.T.	48	55	14	4	4	-	1	23	47,92	25	52,08	55	-	3	1	1	1	6	10,91	49	89,09
26	Irian Jaya	20	20	0	2	-	1	-	3	15,00	17	85,00	20	-	3	-	1	1	5	25,00	15	75,00
27	Timor-Timur	12	25	0	1	-	-	-	1	8,33	11	91,67	25	1	-	-	-	-	1	4,00	24	96,00
Jumlah		1.406	1.405	410	101	62	51	72	1.076	76,58	670	47,68	1.405	291	194	129	7	67	988	70,32	807	57,43

Keterangan:

- I SK No.
 II SK No. 085/J31/KEP/98, Tgl. 28 Juli 1999, Jml Lulus = 355 (Angk. I = 161 + Angk. II = 194)
 III SK No. 09/J31/KEP/99 Tgl. 5 Februari 1999, Jml Lulus = 221 (Angk. I = 92 + Angk. II = 129)
 IV SK No. 105/J31/KEP/99 Tgl. 27 Juli 1999, Jml Lulus = 121 (Angk. I = 54 + Angk. II = 67)
 V SK No. 0733/J31.1.13/KEP/2000 Tgl. 8 Februari 2000, Jml Lulus = 139 (Angk. I = 72 + Angk. II = 67)

Table 1. Searching for Generic Policy Solutions

	Market Mechanisms	Incentives	Rules	Non market Supply	Insurance and Cushions
Market failures					
Public goods	S	S	S	P	
Externalities	S	P	P	S	
Natural monopoly	S	S	P	P	
Information asymmetry			P	S	S
Noncompetitive behavior			P		
Preference-related problems	S	S	P		
Uncertainty problems			P		S
Intertemporal problems			S		P
Adjustment costs					P
Distributional concerns					
Equity of opportunity		S	S		P
Equality of outcomes			S		P
Governmental failures					
Democracy			P		
Bureaucracy	P		S		
Bureaucratic problems	P	S	S	S	
Decentralization	S	P		S	

P : Primary source of policy solutions*

S : Secondary source of policy solutions*

* Remember, this framework is primarily normative (the generic policies that "make sense"), rather than positive (the generic policies most often adopted).